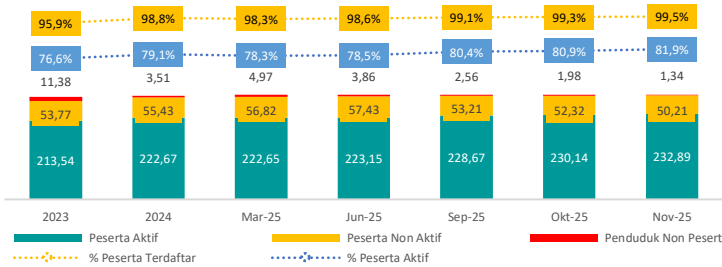


# Monthly Report Monitoring JKN

30 November 2025

## Kepesertaan dan Kesehatan Keuangan

Peserta Aktif dan Non Aktif dalam Juta Jiwa



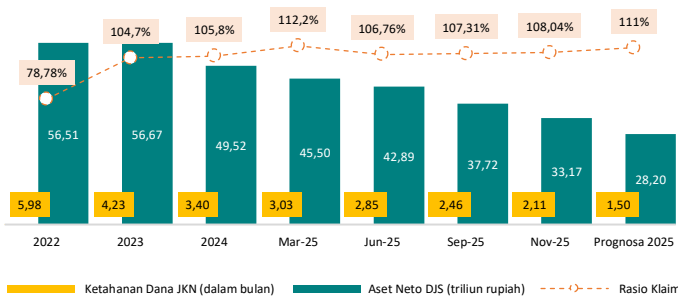
Sumber : BPJS Kesehatan dan BPS, diolah

No	Segmen Peserta	November 2025			
		Aktif	Non Aktif Menunggak	Non Aktif Mutasi	Total Peserta Terdaftar
1	Penerima Bantuan Iuran	96.713.222		17.844.861	114.558.083
2	PPU Penyelenggara Negara	19.770.297	29.891	756.148	20.556.336
3	PPU Non Penyelenggara Negara	38.720.014	119.975	7.999.023	46.839.012
4	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUPU)	17.596.899	13.694.948	1.689.308	32.981.155
5	Bukan Pekerja (BP)	4.964.019	30.803	394.304	5.389.126
	a. BP Penyelenggara Negara (BP PN)	4.519.114		349.733	4.868.847
	b. BP Swasta (BP Non PN)	444.905	30.803	44.571	520.279
6	PBPUPU Pemda	54.796.126		7.976.927	62.773.053
	<b>Total Peserta</b>	<b>232.560.577</b>	<b>13.875.617</b>	<b>36.660.571</b>	<b>283.096.765</b>

Sumber : BPJS Kesehatan, diolah

Peserta non aktif dikarenakan menunggak sejumlah 13,87 juta, terbanyak adalah dari segmen PBPUPU Mandiri sebesar 13,69 juta (98,69%). Peserta non aktif dikarenakan proses mutasi sejumlah 36,66 juta, yang terdiri dari 17,84 juta dari segmen PBI, dan sebesar 7,97 juta dari segmen PBPUPU Pemda. Sebesar 7,99 juta dari PPU Non PN disebabkan oleh perubahan status pekerjaan dan belum menentukan segmen kepesertaan JKN, 756,15 ribu peserta non aktif mutasi segmen PPU PN, dan diikuti segmen yang lainnya.

### Kondisi Kesehatan Keuangan



Sumber : BPJS Kesehatan, diolah

**Aset Neto DJS Kesehatan** diproyeksikan dapat membiayai 2,11 bulan kedepan (**sehat, namun rentan defisit**). Tanpa adanya bauran kebijakan segera, Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan diproyeksikan mengalami risiko defisit aset neto dan gagal bayar pada semester I tahun 2026. **YoI DJS Kesehatan** sebesar 5,46% atau Rp3,69 triliun, dengan rata-rata kelolaan dana investasi sebesar Rp67,6 triliun selama Januari 2025 hingga November 2025, terbagi pada surat utang negara sebesar Rp18,98 triliun (28,1%), deposito sebesar Rp44,07 triliun (65,2%), dan SRBI sebesar Rp4,5 triliun (6,7%), target YoI sebagaimana Indikator Capaian Kinerja (ICK) tahun 2025 yang ditetapkan DJSN sebesar 7%.

**Dana operasional** BPJS Kesehatan tahun 2025 ditetapkan 3,55% dari penerimaan iuran program JKN, dan atau maksimal Rp5,98 triliun sebagaimana PMK 134/2024. Realisasi **Beban terhadap dana operasional + pendapatan investasi (BOPO)** berada diposisi **87,72%**, sesuai ketentuan Permenkeu 251 Tahun 2016 yang mengamahkan maksimal BOPO sebesar 95%. **YoI BPJS Kesehatan** tercapai sebesar 9,07% (neto), dengan perolehan imbal hasil investasi sebesar Rp1,04 triliun dari rata-rata portofolio Investasi BPJS Kesehatan sebesar Rp11,48 triliun. Imbal hasil investasi BPJS Kesehatan telah melampaui target sebagaimana ditetapkan oleh DJSN dalam ICK Tahun 2025 sebesar 7%.

**Cakupan kepesertaan** JKN Per 30 November 2025 telah mencapai 283 juta jiwa atau 99,5% dari penduduk Indonesia Tahun 2025. Cakupan peserta tumbuh 5 juta (1,80%) dibanding 31 Desember 2024. Berdasarkan cakupan peserta yang hampir menyeluruh, maka fokus dan strategi saat ini lebih menekankan pada meningkatkan keaktifan peserta JKN disemua segmen, khususnya sektor informal.

Capaian **kepesertaan aktif** sebesar 232,89 juta jiwa atau 81,9% dari jumlah penduduk, dan 82,27% dari keseluruhan peserta, peserta aktif tumbuh 4,59% atau 10,2 juta jiwa dibanding 31 Desember 2024, penambahan/penurunan peserta aktif didorong oleh beberapa segmen berikut :

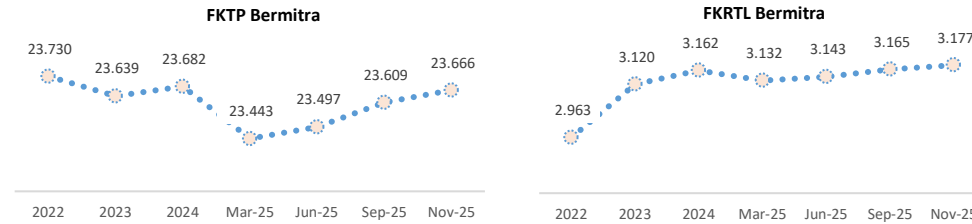
- **PBI JK** -28,67 ribu jiwa (-0,03%)
- **PPUPN** +829,47 ribu jiwa (+4,38%)
- **PPUBU** +1,27 juta jiwa (+3,40%)
- **PBPUPU** +384 ribu jiwa (+2,23%)
- **BP** +337,32 ribu jiwa (+6,80%)
- **PBPUPU Pemda** +7,37 juta jiwa (+15,54%)

Per 30 November 2025, program JKN mencatatkan defisit operasional yang menyebabkan **penurunan aset neto Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebesar Rp16,35 triliun (YTD)**. Hal ini terjadi karena realisasi beban jaminan kesehatan sebesar Rp172,59 triliun telah melampaui pendapatan iuran sebesar Rp159,75 triliun, sehingga menghasilkan **rasio klaim sebesar 108,04%**. Perolehan pendapatan iuran telah mencapai 93,24% dari target Desember 2025. Tren penurunan aset neto dan rasio klaim di atas 100% ini telah berlangsung konsisten sejak 2023, menunjukkan bahwa total pendapatan belum mampu mengimbangi tingginya biaya layanan kesehatan, yang berisiko pada sustainabilitas keuangan JKN.

# Monthly Report Monitoring JKN

30 November 2025

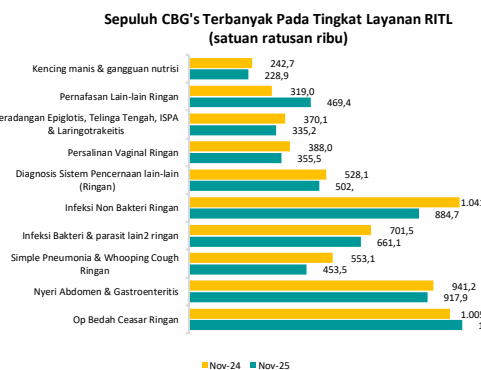
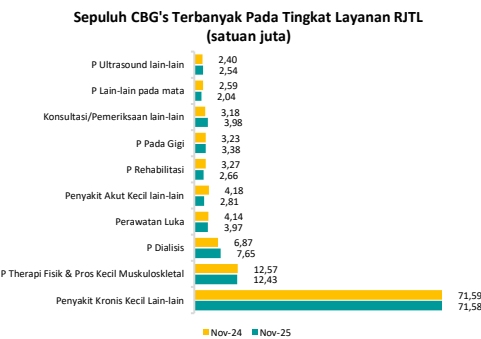
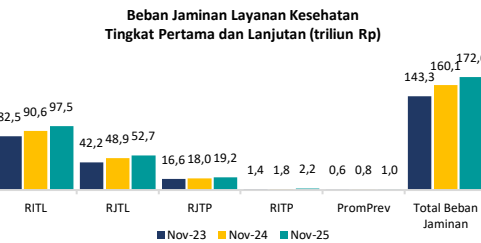
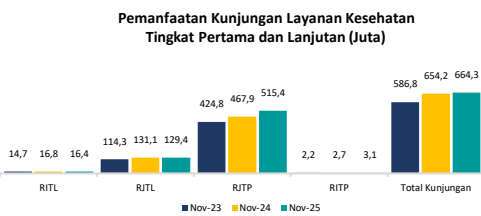
## Kerjasama Faskes dan Utilisasi



Sumber : BPJS Kesehatan, diolah

mengalami peningkatan tertinggi sebanyak 171. **Kerja sama FKRTL tercatat 3.177**, bertambah 15 dibanding akhir 2024. Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan 4.902 apotek dan 1.256 optik sebagai fasilitas kesehatan Penunjang. Capaian jumlah kerja sama FKTP dan FKRTL telah memenuhi target ICK 2025 yang ditetapkan oleh DJSN.

Per November 2025, **kerja sama dengan FKTP** tercatat sebanyak 23.666, turun 16 FKTP dibanding 31 Desember 2024. Penurunan terbesar berasal dari Dokter Praktik Perorangan (DPP) yang berkurang 188 menjadi 4.461. Sementara itu, klinik pratama



Sumber : BPJS Kesehatan, diolah

**Pemanfaatan layanan kesehatan hingga 30 November 2025** meningkat sebanyak 1,5% dibanding November 2024. Pemanfaatan tertinggi berasal dari Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebanya 515,4 juta kunjungan, mengalami peningkatan 10,1% atau bertambah 47,46 juta dibanding November 2024. Selanjutnya diikuti oleh pemanfaatan layanan kesehatan di Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) sebanyak 129,4 juta kunjungan, menurun 1,3%. Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) sebanyak 16,4 juta kunjungan, menurun 2,6% dan pemanfaatan layanan kesehatan terendah terdapat di Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITP) sebanyak 3,1 juta, meningkat 17,2%. Berdasarkan hal tersebut, fungsi *gatekeeper* FKTP semakin optimal dalam menyerap tingginya kebutuhan layanan primer peserta JKN. Efisiensi ini dipertegas dengan keberhasilan menekan beban di layanan yang lebih mahal, yaitu penurunan kunjungan RJTL dan RITL, sehingga dapat memastikan keberlanjutan dan efektifitas biaya Program JKN.

**Beban Jaminan** pada November 2025 mengalami peningkatan 7,8% dibanding November 2024, dari Rp160,1 triliun menjadi Rp172,6 triliun. Alokasi beban jaminan didominasi oleh Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) sebesar Rp97,5 triliun atau 56,5% dari keseluruhan beban jaminan, diikuti oleh Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) sebesar 30,5%, Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) 11,1%, Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) 1,3% dan terkecil adalah alokasi promotif dan preventif sebesar 0,6% dari total beban jaminan.

**Pembayaran manfaat RJTL** per November 2025 mencapai Rp52,7 triliun, naik 7,8% dibanding pembayaran manfaat RJTL pada November 2024. Jumlah kunjungan RJTL adalah sebesar 129,4 juta kunjungan, diagnosa terbanyak di RJTL yaitu penyakit kronis kecil lain-lain, prosedur terapi fisik dan prosedur kecil muskuloskeletal, prosedur dialisis, perawatan luka, penyakit akut kecil-kecil lain, dan lain sebagainya. Penurunan beberapa kasus terbesar CBG's RJTL adalah indikasi efektifitas kendali mutu dan kendali biaya.

**Pembayaran manfaat RITL** hingga November 2026 mencapai Rp97,5 triliun, meningkat 7,6% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Kasus terbanyak didominasi oleh persalinan dengan operasi bedah caesar ringan, nyeri abdomen & gastroenteritis, disusul oleh infeksi non bakteri (ringan). Mayoritas kelompok INA-CBG's RITL pada November 2025 menunjukkan penurunan volume layanan dibandingkan November 2024, kecuali beberapa kasus spesifik. Tren ini mengindikasikan adanya perubahan pola rujukan dan/atau pergeseran layanan dengan kendali mutu dan kendali biaya yang lebih optimal. Namun demikian, perlu dipastikan bahwa kebijakan kendali mutu dan biaya benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta, sehingga tidak menimbulkan hambatan akses layanan kesehatan yang seharusnya dapat diberikan di tingkat lanjutan.